



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 - 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Pendidikan Nasional;
13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Kehutanan;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;

17. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

17. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
20. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
21. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
22. Menteri Sekretaris Negara;
23. Sekretaris Kabinet;
24. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
26. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;
28. Para Gubernur;
29. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

- KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, ekonomi makro dan keuangan, ketahanan energi, sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN, infrastruktur, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri, Kepala Lembaga, dan Gubernur.
b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :
1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.
- KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Dr. M. Imam Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TANGGAL : 22 MEI 2008

A. PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. KELEMBAGAAN, PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA DAN PENDAFTARAN TANAH						
A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Penanaman modal	1. Penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal.	a. Menyusun Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Presiden tentang Tata cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Juni 2008	Tata cara penanaman modal yang jelas dan sederhana bagi penanaman modal.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Menyelesaikan aturan tentang norma dan standar sesuai Tata Cara Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Peraturan Kepala BKPM	Juni 2008	Kejelasan mengenai norma dan standar dalam tatacara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal.	Kepala BKPM

c. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Menyusun Kebijakan Umum Penanaman Modal.	Kebijakan Umum Penanaman Modal	Juli 2008	Rencana umum penanaman modal yang jelas dan terarah.	Kepala BKPM
	2. Fasilitas non-fiskal bagi penanaman modal	a. Merumuskan fasilitas keimigrasian	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia	Juli 2008	Tersedianya fasilitas keimigrasian yang memudahkan bagi penanam modal.	Menteri Hukum dan HAM
		b. Merumuskan kebijakan untuk mempermudah impor barang modal dan bahan baku proyek-proyek penanaman modal	Peraturan Menteri Perdagangan	Juli 2008	Kemudahan impor barang modal dan bahan baku proyek-proyek penanaman modal	Menteri Perdagangan
	3. Fasilitas Fiskal Bagi Penanaman Modal	Menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007	Juni 2008	Penambahan bidang usaha dan daerah tertentu yang mendapatkan fasilitas keringanan PPh bagi penanam modal.	Menteri Keuangan

4. Percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	4. Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi	a. Merumuskan Kebijakan Penanaman Modal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Juni 2008	Tersedianya insentif fiskal dan non fiskal pada penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus	Kepala BKPM
		b. Menetapkan Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	Peraturan Presiden	Juni 2008	• Tersedianya perangkat kelembagaan dan meningkatkan kepastian usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). • Efektifitas pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		c. Menetapkan keanggotaan Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, dan Dewan Kawasan Karimun	Keputusan Presiden	Juni 2008		

5. Pemantauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5. Pemantauan pendirian perusahaan	Memonitor pelaksanaan pendirian perusahaan	Diseminasi informasi berkala triwulanan mengenai waktu pendirian perusahaan dimulai dari pengecekan nama sampai dengan Pengesahan pendirian PT	Juni 2008 - berlanjut	Tercapainya waktu pengesahan pendirian PT maksimal 7 hari	Menteri Hukum dan HAM
	6. Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	a. Menyusun database informasi penanaman modal nasional, daftar Negatif Penanaman modal, jenis perizinan dan persyaratan penanaman modal dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal	Database informasi	Juni 2008 dan berlanjut	Tersedianya informasi perkembangan penanaman modal dan potensi penanaman modal persektor, daerah, dan nasional; penanaman modal yang tertutup dan terbuka bersyarat, jenis perizinan dan pelayanan penanaman modal	Kepala BKPM

b. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Menyusun cetak biru pembangunan kelembagaan, SDM, <i>business process</i> dan teknologi informasi dan komunikasi SPIPISE	Cetak biru SPIPISE	Agustus 2008	Adanya desain pembangunan SPIPISE	Kepala BKPM
		c. Membangun Portal Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronika	Terbangunnya Portal SPIPISE	November 2008 dan berlanjut	Adanya portal SPIPISE	Kepala BKPM
		d. Menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronika	Beroperasinya <i>pilot project</i> Tahap Kesatu	Desember 2008 dan berlanjut	Beroperasinya SPIPISE di 3 lokasi untuk subsektor prioritas nasional	Kepala BKPM
			Beroperasinya <i>pilot project</i> tahap kedua	Maret 2009 Dan berlanjut	Beroperasinya SPIPISE di 5 lokasi untuk subsektor prioritas nasional	

Beroperasinya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			Beroperasinya SPIPISE secara nasional	November 2009 dan berlanjut	Adanya kemudahan pelayanan informasi dan perijinan penanaman modal di Indonesia	Kepala BKPM
B. Penyederhanaan Perizinan Usaha	1. Penyederhanaan perizinan di tingkat nasional	a. Melakukan pemetaan dan rekomendasi perizinan usaha pada sektor-sektor ekonomi kunci oleh Timnas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) dan SPIPISE	Rumusan kebijakan penyederhanaan izin-izin usaha	Desember 2008 dan berlanjut	Dihasilkannya rumusan Kebijakan untuk mengurangi izin-izin usaha yang tumpang tindih dan membebani dunia usaha	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Penyederhanaan izin-izin untuk melakukan usaha yang diterbitkan departemen	Peraturan Menteri terkait	Juni 2009 & berlanjut	Izin-izin usaha yang membebani dunia usaha serta waktu dan biaya pengurusan menjadi berkurang	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

2. Penyederhanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Penyederhanaan perizinan di daerah.	a. Pengurangan jumlah hari untuk memulai usaha melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta	Instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang penyederhanaan prosedur dan pengurangan waktu untuk memulai usaha di Jakarta	Juni 2008	Berkurangnya waktu untuk memperoleh perizinan usaha di DKI Jakarta menjadi 38 hari.	Gubernur DKI Jakarta
		b. Pemetaan dan penyampaian kebijakan penyederhanaan perizinan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta	Rumusan kebijakan untuk penyederhanaan izin-izin usaha	Desember 2008	Rumusan kebijakan untuk mengurangi izin-izin usaha yang tumpang tindih dan membebani dunia usaha di DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta
		c. Penyederhanaan izin-izin usaha melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk penyederhanaan izin usaha	Mei 2009 dan berlanjut	Izin-izin usaha yang tumpang tindih dan membebani dunia usaha menjadi berkurang di DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta

C. Pendaftaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
C. Pendaftaran Tanah	1. Penyederhanaan Proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	a. Percepatan proses pelayanan PBB dan BPHTB	i) Peraturan Dirjen Pajak tentang Standar Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB-BPHTB)	Juni 2008	Penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas penelitian SSB menjadi 1 hari kerja dari sebelumnya 2 hari kerja, dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan	Menteri Keuangan
			ii) SE Dirjen Pajak tentang Standar Penerbitan Surat Keterangan NJOP	Juni 2008	Percepatan penerbitan informasi BJOP dan penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas penerbitan surat keterangan NJOP menjadi 1 hari kerja dari sebelumnya 3 hari kerja, dalam hal objek PBB sudah terdaftar.	
			iii) SE Dirjen Pajak penegasan bahwa hanya SSB Nihil yang diketahui/ditandatangani oleh PPAT	Juni 2008	Menegaskan bahwa hanya SSB nihil yang diketahui/ditandatangani oleh PPAT	

iv) SE ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 9 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iv) SE Dirjen Pajak tentang standar penerbitan salinan SPPT	Juni 2008	Penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas penerbitan salinan SPPT dalam 1 hari kerja	Menteri Keuangan
	2. Peningkatan pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	a. Membentuk Tim mengenai pengembangan sistem pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Sura Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Juni 2008	Kejelasan tentang pembagian kerja dalam penyusunan sistem pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Menyusun Program Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	Program Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> .	November 2008	Dimilikinya suatu program aplikasi yang dapat menjamin pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> , sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien.	Kepala BPN

c. Mengoperasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 10 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Mengoperasikan pilot project Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara on-line di Jakarta	Keputusan Kepala BPN tentang pilot project Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara on-line di Jakarta	Desember 2008	Penerapan Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-Line</i> di Jakarta sebagai <i>pilot project</i> .	Kepala BPN
		d. Pengoperasian secara bertahap pada tingkat nasional Sistem Pelayanan Informasi pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i>	Sistem Pelayanan Informasi pendaftaran sertifikat tanah secara <i>on-line</i> di tingkat nasional	Februari 2009 dan berlanjut	Pelayanan informasi dan pendaftaran sertifikat tanah yang lebih mudah, cepat dan berbiaya rendah	Kepala BPN
II. KELANCARAN ARUS BARANG & KEPABEANAN						
A. Kelancaran arus barang ekspor dan impor	1. Penataan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Menyusun kebijakan umum pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Penetapan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Juni 2008	Tertatanya pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor.	Menteri Perhubungan

2. Percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 11 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Percepatan proses pengeluaran barang impor dan ekspor (<i>Customs Clearance</i>)	a. Menyempurnakan manajemen resiko kepabeanan	Profil Importir berdasarkan Negara Asal untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan Impor.	Juli 2008	Penetapan jalur pelayanan secara cepat dan tepat serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan.	Menteri Keuangan
		b. Perbaiki akses transportasi dari kawasan industri ke pelabuhan	i) Peningkatan jalan nasional (Bekasi-Cikarang)	Desember 2008		
			ii) Peningkatan/ pelebaran jalan raya Cibarusah (Lemahabang-Mekamukti)	Desember 2008		
			iii) Peningkatan/ Pelebaran Jalan Cakung-Cilincing	Juni 2008		
			iv) Pembangunan <i>Fly Over</i> Cikarang	Desember 2008		

v) Penambahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 12 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			v) Penambahan lajur jalan tol Cikarang-Cikarang Timur	Juni 2009		Menteri Pekerjaan Umum
B. Pengembangan Fasilitas Kepabeanan (<i>Customs Facilities</i>)	Penyempurnaan Ketentuan Tempat Penimbunan Berikat (TPB)	Menyusun peraturan tentang TPB untuk mengakomodasi tambahan jenis TPB baru.	Peraturan Menteri Keuangan	Juli 2008	Pengguna dan penanaman modal di TPB meningkat	Menteri Keuangan
C. Penguatan Pelayanan Publik untuk Mendorong Perdagangan Luar Negeri	1. Melanjutkan Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW (<i>National Single Window</i>)	a. Implementasi Tahap Kedua penerapan sistem NSW	i) Beroperasinya sistem NSW Impor untuk Importir <i>kelompok risiko rendah</i> (MITA Prioritas, MITA Non Prioritas, <i>Low-Risk Importer</i>) di Tanjung Priok	Juni 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pengurusan penyelesaian impor oleh seluruh importir & PPJK • Interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem di semua GA dalam pelayanan impor • Peningkatan kinerja pelayanan dan pengawasan arus barang impor di Tanjung Priok 	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			ii) Jumlah instansi yang terlibat bertambah menjadi 15			

iii) Terbangunnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 13 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii)Terbangunnya Desain Teknis dan Model untuk Sistem NSW Ekspor.			Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			iv)Sistem NSW Sea Port diuji coba integrasi ke dalam portal NSW di Tanjung Priok			
			v) Terbangunnya Desain Teknis dan model sistem NSW <i>Air Port</i>			

b. Implementasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 14 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Implementasi Tahap Ketiga penerapan sistem NSW	i) Sistem NSW Impor diterapkan secara penuh untuk seluruh Importir di 5 pelabuhan utama	Desember 2008	<ul style="list-style-type: none">• Kemudahan pengurusan penyelesaian impor & ekspor• Interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem di semua GA dalam pelayanan impor dan ekspor• Peningkatan kinerja pelayanan dan pengawasan arus barang ekspor di Tanjung Priok dan impor di 5 pelabuhan utama	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			ii) Semua instansi yang terkait terlibat			
			iii) Sistem NSW Ekspor sudah mulai diterapkan di Tanjung Priok			
			iv) Sistem NSW Sea Port diterapkan secara mandatory di Pelabuhan Tanjung Priok			

v) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 15 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			v) Sistem NSW Air-Port diterapkan secara mandatory di Bandara Soekarno-Hatta	Desember 2008		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			vi) Interkoneksi melalui Portal NSW sudah menerapkan sistem pelayanan secara SSO (<i>Single Sign On</i>)			
		c. Implementasi Tahap Nasional sistem NSW Impor dan sistem NSW Ekspor	Sistem NSW Impor dan NSW Ekspor diterapkan secara penuh di 5 pelabuhan utama, NSW Sea Port di 4 pelabuhan utama dan sistem NSW Air Port diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta	April 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pengurusan penyelesaian impor & Ekspor • Interkoneksi dan interoperabilitas antar sistem di semua GA dalam pelayanan impor dan ekspor 	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 16 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kinerja pelayanan dan pengawasan arus barang ekspor dan impor di 5 pelabuhan utama	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		d. Menyiapkan Peraturan Pelaksanaan Penggunaan Sistem Elektronik dalam kerangka INSW	Peraturan Menteri/ Kepala Badan/ Lembaga terkait	Juni - Desember 2008	Adanya dasar hukum bagi pengoperasian Sistem NSW	
		e. Menyiapkan bentuk kelembagaan bagi pengoperasian sistem NSW	Terbentuknya lembaga pelaksana operasional INSW	Desember 2008	Pengelolaan pelayanan publik melalui sistem INSW yang profesional	
		f. Mempersiapkan Integrasi sistem NSW ke dalam sistem <i>ASEAN Single Window</i> (ASW)	Sistem INSW terintegrasi dengan sistem ASW	Juni 2009	Terintegrasinya sistem INSW ke dalam Sistem ASW	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 17 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Sinkronisasi Kebijakan Logistik	Penyusunan cetak biru dan penyusunan peraturan-peraturan mengenai jasa logistik nasional.	i) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Nasional Jasa Logistik ii) Cetak biru jasa logistik nasional iii) Penyempurnaan peraturan-peraturan yang menyangkut jasa logistik	Juni 2008 November 2008 Desember 2008 - berlanjut	Terkoordinasinya kebijakan di bidang jasa logistik demi meningkatnya efisiensi penyediaan jasa logistik nasional.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
D. Pengamanan Pasar	1. Pengawasan Perkembangan Impor Ekspor	Meningkatkan pemantauan dan mengidentifikasi secara intensif perkembangan peningkatan impor dan penurunan ekspor sebagai dasar pengamanan pasar jangka pendek	i) Pembentukan Forum Komunikasi Perlindungan Usaha dan Konsumen	Juni 2008 – berlanjut	Mengawasi dan menyelesaikan gangguan impor ekspor	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

ii) Rekomendasi ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 18 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Rekomendasi permintaan tindak lanjut dalam upaya peningkatan ekspor dan penurunan impor			Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	2. Penguatan Instrumen Perlindungan Gangguan Ekspor dan Impor	Peningkatan pengawasan <i>Illegal Transshipment, circumvention, labelling, Standard and Conformance.</i>	i) Implementasi otomasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di 28 Instansi Penerbit SKA (IPSKA)	Desember 2008	Tercegahnya kegiatan <i>illegal transshipment/ circumvention</i>	Menteri Perdagangan
ii) Pengoperasian sistem aplikasi <i>data entry</i> di 57 IPSKA			Oktober 2008	Tersedianya sarana komunikasi on-line antara IPSKA dan Departemen Perdagangan		
iii) Peraturan Menteri Perdagangan tentang SKA Impor			Juni 2008	Remedi (Penyembuhan/Pemulihan) terhadap industri di dalam negeri		

iv) Pedoman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 19 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iv) Pedoman bagi daerah tentang pengawasan illegal trading, kepatuhan ketentuan penggunaan label, dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Agustus 2008	Meningkatkan partisipasi aktif Daerah dalam pemberantasan <i>illegal trading</i>	Menteri Perdagangan
	3. Penanggulangan Hambatan Ekspor	a. Memberikan pedoman findakan bagi perwakilan Luar negeri, Pemda, dan pelaku usaha dalam menghadapi masalah ekspor yang menyangkut kebijakan negara lain	Penerbitan SOP/Mannual penanggulangan hambatan ekspor di luar negeri	Juli 2008	Adanya pegangan standar dalam mengatasi permasalahan ekspor di LN, seperti AD, CVD, SM, SPS, TBT.	Menteri Perdagangan

b. menginventarisir ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 20 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. menginventarisir dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan praktek Negara lain yang menghambat ekspor Indonesia untuk mendapatkan penyelesaian secara bilateral	Daftar Berkala Kebijakan dan Praktek-praktek di negara lain yang menghambat ekspor Indonesia	Juni 2008 – berlanjut	Adanya acuan yang lebih akurat dalam pertemuan dan perundingan bilateral dengan negara mitra dagang	Menteri Perdagangan
	4. Pengembangan pelaku ekspor	Menyusunan database pelaku ekspor Indonesia yang kredibel	<i>Indonesian Exporters Profile</i>	Oktober 2008 – berlanjut	Meluasnya informasi tentang pelaku ekspor Indonesia	Menteri Perdagangan

III. PERPAJAKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 21 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
III. PERPAJAKAN						
Meningkatkan Pelayanan Perpajakan	1. Percepatan proses pelayanan atau penyelesaian permohonan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi Wajib Pajak (WP) persyaratan tertentu	Memperluas kelompok Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang berhak memperoleh pengembalian pendahuluan	Peraturan Menteri Keuangan	Agustus 2008	Penambahan jumlah Wajib Pajak yang memperoleh restitusi PPN dalam jangka waktu 7 hari	Menteri Keuangan
	2. Penyediaan layanan prima bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan peningkatan <i>Built-in Control System</i>	Membentuk 128 KPP Pratama di luar Pulau Jawa & Bali yang berbasis sistem administrasi modern	KEP Dirjen Pajak	Desember 2008	Pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi untuk semua Wajib Pajak.	Menteri Keuangan

3. Penyederhanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 22 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Penyederhanaan mekanisme pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25, bagi Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran secara <i>on-line</i> .	Menyederhanakan proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 bagi WP yang melakukan pembayaran secara <i>on-line</i>	Peraturan Dirjen Pajak	Juni 2008	Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 secara on line tidak perlu menyampaikan SPT Masa ke KPP	Menteri Keuangan

B. KEBIJAKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 23 ~

B. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. STABILITAS SISTEM KEUANGAN						
A. Memperkuat Mekanisme Koordinasi Sektor Keuangan	1. Penyusunan regulasi penanganan krisis keuangan	a. Penyelesaian RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)	Penyampaian draf final RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan kepada DPR	Agustus 2008	Kepastian landasan hukum Penanganan Krisis Sektor Keuangan	Menteri Keuangan berkoordinasi Gubernur Bank Indonesia.
		b. Penyiapan Protokol Manajemen Krisis Keuangan	Protokol Manajemen Krisis Keuangan	Juli 2008	Kepastian Tata Cara/Protokol pelaksanaan Manajemen Krisis Keuangan	
	2. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK)	a. Penguatan Forum Stabilitas Sistem Keuangan	Revisi SKB Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia	Agustus 2008	Peningkatan efektivitas FSSK	Menteri Keuangan berkoordinasi Gubernur Bank Indonesia

b. Penyusunan...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 24 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Penyusunan ASKI (Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia)	ASKI	Oktober 2008	Sektor keuangan semakin sehat dan berkembang	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
		c. Pengembangan dan penerapan <i>Early Warning System</i> (EWS) sektor keuangan	Penerbitan hasil <i>Model Macro EWS</i> secara teratur	Desember 2008	<i>Macro EWS</i> telah digunakan secara efektif	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
B. Harmonisasi Kebijakan Sektor Keuangan	1. Pengembangan peraturan dan pengawasan produk <i>offshore</i> di pasar keuangan domestik	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyempurnaan regulasi dan pengembangan sistem monitor terkait produk pasar keuangan <i>offshore</i>	Regulasi dan Usulan Sistem Pelaporan yang terkait dengan produk pasar keuangan <i>offshore</i>	Juni 2008 - berlanjut	Terwujudnya sistem monitor perkembangan <i>offshore product</i> di pasar keuangan domestik	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia

2. Penyempurnaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 25 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Penyempurnaan pengaturan dan pengawasan pasar surat utang (obligasi)	a. Pengkajian tentang konsolidasi dan integrasi sistem kliring dan <i>settlement</i> transaksi surat utang (obligasi)	Hasil kajian tentang sistem kliring dan <i>settlement</i> surat utang (obligasi)	Desember 2008	Sistem kliring dan <i>settlement</i> yang lebih efisien, kredibel dan transparan	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
		b. Penyusunan pengaturan sistem kliring dan <i>settlement</i> transaksi surat utang	Peraturan sistem kliring dan <i>settlement</i> transaksi surat utang	Juni 2009		
	3. Penguatan pengawasan terhadap bank yang menjadi <i>selling agent</i> untuk produk asuransi dan reksa dana.	Penyusunan ketentuan pengawasan bank yang memiliki perjanjian <i>bancassurance</i> , dan agen reksa dana	Peraturan Bank Indonesia	Agustus 2008	Terbentuknya sistem pengawasan bank yang semakin efektif	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia

C. Memperkuat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 26 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
C. Memperkuat sistem keuangan	Perluasan cakupan Sistem Informasi Debitur (SID)	Meningkatkan cakupan informasi Biro Informasi Kredit (BIK)	Tercakupnya data perusahaan pelayanan umum (perusahaan utilitas) pada SID	Desember 2008	Peningkatan pelayanan Biro Informasi Kredit	Menteri Koordinator Bidang Perkonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia
II. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN						
Memperkuat lembaga keuangan perbankan	Penguatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Menyusun arah kebijakan pengembangan BPR di masa mendatang melalui peningkatan peran dan kontribusi BPR dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal	Cetak Biru strategi pengembangan BPR	Desember 2008	Terdapatnya strategi pengembangan BPR yang mendukung perkembangan ekonomi lokal	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia

III. LEMBAGA ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 27 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
III. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK						
A. Memperkuat Sektor Industri Asuransi	Meningkatkan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi	a) Melakukan kajian mengenai urgensi dan pra kondisi untuk program perlindungan pemegang polis asuransi	Kajian akademik mengenai urgensi dan prakondisi untuk program perlindungan pemegang polis asuransi	November 2009	Menyehatkan industri asuransi dan perlindungan terhadap peserta asuransi semakin baik	Menteri Keuangan
		b) Pengembangan <i>database</i> profil risiko untuk usaha asuransi, kendaraan bermotor dan pemberian akses kepada industri	Database profil risiko yang digunakan perusahaan asuransi dalam menetapkan tarif preminya	November 2009		
B. Memperkuat sektor Industri Dana Pensiun	1. Pengembangan pengawasan dana pensiun berbasis risiko	Memperkuat pengawasan dana pensiun dengan penerapan Sistem Pemeringkatan Risiko (SPERIS) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SANBERRIS)	Revisi Manual Pemeriksaan Dana Pensiun	September 2008	Peningkatan kesehatan industri dana pensiun	Menteri Keuangan

2. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 28 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Pengembangan Portofolio Penanaman Modal Dana Pensiun	Melakukan revisi atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KM.06/2002 tentang Penanaman modal Dana Pensiun	Keputusan Menteri Keuangan	November 2008	Peningkatan kesempatan penanaman modal dan penyebaran resiko penanaman modal Dana Pensiun	Menteri Keuangan
C. Memperkuat sektor Industri Perusahaan Pembiayaan	1. Penguatan perusahaan modal ventura	Perubahan regulasi yang mengatur 1) perluasan produk modal ventura dari hanya penyertaan modal menjadi penempatan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil, 2) peningkatan ketentuan modal disetor minimum perusahaan modal ventura	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan	Juli 2008	Pengembangan potensi UKM melalui perusahaan modal ventura sehingga Industri modal ventura makin berkembang	Menteri Keuangan
			Perubahan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan	November 2009		

2. Penguatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 29 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Penguatan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan	Menyusun Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan	Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan	Juni 2008	Peningkatan kesehatan perusahaan pembiayaan	Menteri Keuangan
	3. Pendirian lembaga pembiayaan pembangunan	Pengkajian pendirian lembaga pembiayaan pembangunan	Rekomendasi tentang pendirian lembaga pembiayaan pembangunan	Desember 2008	Berkembangnya sumber dana jangka panjang	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
D. Pengembangan Usaha Jasa Gadai	Penyiapan RUU tentang Usaha Jasa Gadai	Pembahasan dalam Panitia Antar Departemen RUU tentang Usaha Jasa Gadai	Draf RUU tentang Usaha Jasa Gadai di sampaikan kepada Presiden	Desember 2008	Meningkatkan jasa layanan gadai dengan membuka persaingan pasar	Menteri Keuangan
E. Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit	1. Pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit termasuk penjaminan untuk UKM	Pengaturan pendirian dan operasi perusahaan penjaminan kredit	Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit	Juli 2008	Lembaga Penjamin Kredit berkembang	Menteri Keuangan

2. Penguatan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 30 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Penguatan Pengawasan Perusahaan Penjaminan Kredit	Penyusunan pedoman pemeriksaan perusahaan penjaminan kredit	Peraturan Ketua Bapepam-LK	Desember 2008	Lembaga Penjamin Kredit berkembang	Menteri Keuangan
IV. PASAR MODAL						
A. Peningkatan peran pasar modal dalam perekonomian nasional	1. Pengembangan pasar Surat Berharga Negara	Pengembangan Infrastruktur Kuotasi <i>Dealer</i> Utama	Sistem Kuotasi <i>Dealer</i> Utama	Oktober 2008	Memperluas dan memperdalam basis investor	Menteri Keuangan
	2. Peningkatan efisiensi transaksi obligasi dan efektifitas perlakuan pajak transaksi obligasi	Melakukan kajian perlakuan pajak atas transaksi obligasi	Hasil kajian perlakuan pajak atas transaksi obligasi.	Agustus 2008		

3. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 31 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerapan dan pengawasan <i>margin trading</i> dan <i>short selling</i>	Menyusun perubahan peraturan Bapepam-LK terkait <i>margin trading</i> dan <i>short selling</i>	Perubahan peraturan Bapepam-LK terkait <i>margin trading</i> dan <i>short selling</i>	Juni 2008	Meningkatkan disiplin pelaku pasar	Menteri Keuangan
B.Mengembangkan produk syariah	1. Pengembangan Produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	a. Melaksanakan dan menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara	i) Peraturan Pemerintah mengenai perusahaan penerbit SBSN	Juni 2008	Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang	
			ii) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan SBSN	Juli 2008		

iii) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 32 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Barang Milik Negara yang dapat digunakan sebagai aset SBSN	Juli 2008	Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang	Menteri Keuangan
			iv) Penerbitan SBSN <i>Ijarah Sale</i> dan <i>Lease Back</i>	Juli 2008		
			v) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai desain instrumen dan metode penerbitan SBSN <i>Ijarah Sale</i> dan <i>Lease Back</i>	Juni 2008	Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

b. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 33 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Pengembangan Produk SBSN	Hasil kajian mengenai desain instrumen SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur	Desember 2008	Terlaksananya penerbitan SBSN khusus untuk pembiayaan proyek infrastruktur	Menteri Keuangan
V. PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)						
Peningkatan kinerja BUMN	1. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN	a. Optimalisasi BUMN melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk BUMN	Pengurangan jumlah BUMN dari 139 menjadi 87.	Oktober 2008 - berlanjut	Peningkatan efisiensi, daya saing, pelayanan masyarakat dan kinerja BUMN	Menteri Negara BUMN
		b. Penyebaran kepemilikan saham BUMN melalui IPO dan <i>Strategic Sale</i>	Privatisasi terhadap 44 BUMN dan perusahaan minoritas baik divestasi saham negara maupun penerbitan saham baru.	November 2008 - berlanjut		

2. Harmonisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 34 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Harmonisasi peraturan perundangan terkait BUMN	a. Evaluasi peraturan perundangan sektor yang terkait dengan BUMN	Rekomendasi penyempurnaan peraturan yang terkait dengan BUMN	Desember 2008 ~ berlanjut	Tercapainya keselarasan peraturan yang terkait dengan BUMN	Menteri Negara BUMN berkordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan
		b. Perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Penyampaian draft Rancangan Undang-Undang Piutang yang memuat perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, kepada Presiden	Juni 2009	Tersusunnya ketentuan piutang BUMN yang harmonis	Menteri Keuangan

VI. PENCEGAHAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 35 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
VI. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG						
Meningkatkan peran efektif industri keuangan sebagai lini depan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Peningkatan ketaatan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atas Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK	a. Mengembangkan modul-modul <i>e-learning</i> mengenai PMN dan sistem anti pencucian uang	i) Modul <i>e-learning</i> untuk industri perbankan	Agustus 2008	Tersedianya bahan pelatihan yang dapat diakses oleh PJK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan PJK dalam menerapkan PMN dan melaksanakan kewajiban pelaporan	Kepala PPATK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
			ii) Modul <i>e-learning</i> untuk PJK Pasar Modal	Oktober 2008		
			iii) Modul <i>e-learning</i> untuk Industri asuransi dan dana pensiun	Januari 2009		
			iv) Modul <i>e-learning</i> untuk lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura	November 2008		

b. Menyiapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 36 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Menyiapkan pedoman kebijakan berbasis risiko	Pedoman PPATK mengenai penerapan kebijakan anti-pencucian uang berbasis risiko	Desember 2008	Berkurangnya beban administrasi bagi PJK dalam menerapkan PMN dan melaksanakan kewajiban pelaporan, serta beban pengawasan regulator dan PPATK	Kepala PPATK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
		c. Melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bekerjasama dengan asosiasi industri/ sektor terkait	Pelatihan dan sosialisasi di berbagai kota di Indonesia	Juni 2008 dan berlanjut	Peningkatan yang signifikan jumlah pegawai PJK yang memahami dan terlatih dalam hal PMN dan sistem anti-pencucian uang	Kepala PPATK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

C. KETAHANAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 37 ~

C. KETAHANAN ENERGI

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Peningkatan Produksi Sektor Migas dan Pertambangan Non Migas	Penyederhanaan prosedur dan perbaikan iklim usaha sektor migas dan pertambangan non migas	a. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Harga Gas	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Harga Gas dan Pengusahaan Migas	Desember 2008	Meningkatnya penanaman modal migas dan pertambangan	Menteri ESDM
		b. Melakukan revisi Peraturan Menteri mengenai pengusahaan Migas (a.l.: kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak DN; <i>cost recovery</i> ; perlindungan konsumen)	Revisi Peraturan Menteri ESDM tentang Pengusahaan Migas			
		c. Melakukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang hulu migas	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang hulu migas			

d. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 38 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		d. Menyusun dan menyempurnakan peraturan Pengolahan dan Pemurnian Mineral	Peraturan Menteri ESDM tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral	Agustus 2009	Meningkatkan penanaman modal sektor pertambangan	Menteri ESDM
		e. Menyusun Cetak Biru: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kilang, jaringan pipa dan receiving terminal LNG dan LPG • Pembangunan jaringan infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian BBM dan kilang BBM (kilang mini) 	Cetak Biru pengembangan infrastruktur migas	Desember 2008	Meningkatkan infrastruktur migas	Menteri ESDM
B. Peningkatan produksi sektor kelistrikan	1. Penyederhanaan prosedur iklim usaha sektor kelistrikan	Menyederhanakan prosedur Pembangunan Listrik Swasta (<i>Independent Power Producer</i> (IPP))	Peraturan Menteri ESDM tentang prosedur IPP	Desember 2008	Memperpendek jumlah hari penyelesaian <i>Power Purchasing Agreement</i> (PPA) dari 445 hari menjadi 355 hari	Menteri ESDM

2. Perluasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 39 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Perluasan akses listrik pedesaan	a. Membuat kerangka kebijakan listrik pedesaan	Cetak biru Pengembangan Listrik Pedesaan (antara lain: sasaran, kebijakan, strategi, rencana tindak)	Desember 2008	Tersedianya listrik di daerah terpencil	Menteri ESDM
		b. Penyediaan APBN untuk listrik pedesaan	2008 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) : 745 kW; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): 19.555 unit; PLTS Terpusat: 10 unit; Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB): 151 unit; Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya: 2 unit. 2009 PLTMH: 2.680 kW; PLTB: 6 unit; PLTS: 77.440 unit	2008 - 2009	Tersedianya listrik di daerah terpencil	Menteri ESDM

c. Penyederhanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 40 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Penyederhanaan Perizinan listrik skala kecil (<1MW)	Peraturan Menteri ESDM tentang perijinan listrik skala kecil	Agustus 2008	Prosedur lebih sederhana; Usaha pembangkit skala kecil berkembang	Menteri ESDM
C. Perbaiki tata kelola sektor migas dan pertambangan	Peningkatan transparansi dalam pengelolaan migas dan pertambangan	a. Menyusun Kesepakatan Bersama antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dalam pengelolaan migas dan pertambangan	MoU antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan	Juni 2008	Makin transparan pengelolaan fiskal sektor migas dan pertambangan	Menteri ESDM dan Menteri Keuangan
		b. Menyusun peraturan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM dalam kerangka Peningkatan transparansi dalam pengelolaan migas dan pertambangan	Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri ESDM	Juni 2009		

D. Diversifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 41 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
D. Diversifikasi energi	1. Program percepatan pengembangan Energi Alternatif	Percepatan Produksi dan Pemanfaatan energi alternatif	Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025	Desember 2008	Tersedianya energi alternatif Terjadinya konversi energi	Menteri ESDM
	2. Pengembangan Bahan Bakar nabati (BBN)	Penetapan kebijakan penggunaan BBN kepada industri	Peraturan Menteri Perindustrian	September 2009	Peningkatan penggunaan BBN	Menteri Perindustrian
	3. Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)	Penyusunan rencana strategis pengembangan DME	Rencana strategis pengembangan DME	Desember 2008	Tersedianya energi alternatif di pedesaan	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

D. SUMBER ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 42 ~

D. SUMBER DAYA ALAM , LINGKUNGAN DAN PERTANIAN

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Peningkatan kualitas lingkungan	Percepatan pengurangan emisi	Melaksanakan REDD (<i>Reducing Emissions from Deforestation and Degradation</i>)	Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai Program dan mekanisme kerja pengurangan emisi dari <i>deforestation</i>	Desember 2008	Terjadinya Penurunan emisi	Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup
		Melaksanakan DNS (<i>Debt for Nature Swap</i>)	Penyusunan Perjanjian dengan Pemerintah Amerika Serikat mengenai DNS-TFCA (<i>Tropical Forest Conservation Act</i>)	September 2008	Peningkatan kualitas hutan dan Penurunan hutang	Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		Mendorong pelaksanaan CDM (<i>Clean Development Mechanism</i>) untuk pembiayaan <i>Carbon Credit</i>	Peraturan Bersama Menteri ESDM dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Ketentuan CDM sektor energi	Desember 2008	Penurunan biaya perbaikan lingkungan	Menteri ESDM dan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 43 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Pemanfaatan Energi Panas Bumi untuk listrik	Peraturan Menteri mengenai pedoman harga jual listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Agustus 2008	Keandalan pasokan listrik meningkat	Menteri ESDM
B. Rehabilitasi Lahan	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	a. Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS untuk mengurangi banjir, kekeringan, dan pencemaran air	Kerangka Kerja Pengelolaan DAS	Desember 2008	Berkurangnya bencana banjir, kekeringan, dan pencemaran air	Menteri Kehutanan
		b. Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> penanganan DAS Terpadu di Sub-DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri	Cetak Biru Pola Penanganan DAS Terpadu	Desember 2008	Meningkatnya keterpaduan penanganan DAS dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim global	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 44 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	Rehabilitasi Lahan Kritis	Percepatan rehabilitasi lahan kritis	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi & Reklamasi Hutan	Desember 2008	Perbaiki Kawasan Hutan	Menteri Kehutanan
	Rehabilitasi & reklamasi	Percepatan perlindungan terhadap abrasi tsunami & intrusi air laut	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove	Desember 2008	Mengurangi dampak abrasi & intrusi air laut	Menteri Kehutanan
	Pemanfaatan Areal yang telah dilepas dari kawasan tetapi tidak aktif	Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pemanfaatan Areal yang telah Dilepas dari Kawasan	Peraturan Menteri Pertanian	Desember 2008	Pemanfaatan areal yang telah dilepas dari kawasan lebih optimal	Menteri Pertanian
C. Pengendalian Subsidi	Subsidi Pertanian Terpadu	Sinkronisasi dan monitoring evaluasi Subsidi Pertanian Tahun 2008	Keputusan Menteri Keuangan mengenai Subsidi Pertanian Terpadu	Desember 2008	Terlaksananya pemberian subsidi pertanian secara efektif dan efisien	Menteri Keuangan

D. Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 45 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
D. Rehabilitasi infrastruktur	1. Rehabilitasi Irigasi Pertanian	Rehabilitasi 500 ribu hektar daerah irigasi senta produksi pangan utama.	Optimalisasi Infrastruktur Irigasi di daerah sentra produksi pangan utama	April 2009	Peningkatan Produktivitas Lahan irigasi	Menteri Pekerjaan Umum
	2. Penetapan tata ruang kawasan Merauke	Penyusunan dan penetapan tata ruang kawasan	Rekomendasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dan Perda Propinsi tentang Tata Ruang Merauke	Desember 2008	Peningkatan investasi pertanian dan penyediaan lahan pangan	Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Papua
E. Peningkatan investasi pangan	Fasilitasi investasi pangan	Penyusunan kebijakan <i>food estate</i>	Keputusan Menteri Pertanian berkaitan dengan <i>food estate</i>	Oktober 2008	Peningkatan investasi pertanian pangan	Menteri Pertanian

E. USAHA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 46 ~

E. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Perluasan Akses Pembiayaan	1. Restrukturisasi Dana Bergulir	Penyelesaian Permenkeu tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Bergulir.	Peraturan Menteri Keuangan	Juni 2008	Tertib pengelolaan anggaran dan efektifitas program pembiayaan UMKM	Menteri Keuangan
	2. Peningkatan penerbitan Sertifikasi Tanah untuk Penjaminan Kredit UMKM	Memberikan kejelasan dan Kecepatan Alokasi Dana, dan Simplifikasi Mekanisme dan Prosedur Sertifikasi, serta Pengawasan dan Pengendalian	Pedoman BPN tentang Percepatan Sertifikasi Tanah UMKM	Juni 2008	Percepatan penerbitan sertifikasi tanah UMKM	Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
	3. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro	a. Memperkuat peran Komnas Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia (PKMI)	Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Komite Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia	Juli 2008	Optimalisasi pembiayaan mikro bagi UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

b. Mempercepat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 47 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Mempercepat proses perolehan pembiayaan keuangan mikro	Proses pembiayaan keuangan mikro melalui Portal Pusat Inovasi-UMKM	Agustus 2008 – berlanjut	Kemudahan memperoleh kredit mikro	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		c. Menetapkan Strategi Pengembangan Keuangan Mikro	SKB Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro	Desember 2008	Terintegrasinya pembiayaan mikro dalam sistem keuangan nasional	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	4. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	a. Evaluasi pelaksanaan KUR b. Perluasan bank pelaksana c. Penyaluran KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro (linkage)	Penyempurnaan Pelaksanaan KUR khusus kredit mikro di bawah Rp. 5 juta	Juli 2008	KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur BI

5. *Linkage ...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 48 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5. <i>Linkage program</i> antara bank umum peserta KUR dengan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Usaha Jasa Keuangan Syariah Koperasi	Mendorong sinergi bank umum dan koperasi dalam penyediaan kredit UMKM	i) Pedoman Umum <i>linkage program</i> KUR ii) Inventarisasi Koperasi calon peserta linkage program	September 2008	Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi koperasi UMK, terwujudnya penyaluran kredit dan dana perbankan kepada usaha mikro skala rumah tangga dibawah Rp.10 juta, dan mempercepat pelaksanaan program penjaminan kredit bagi UMKK	Menteri Negara Koperasi dan UKM
	6. Peningkatan Peran Koperasi Simpan Pinjam, Usaha Simpan Pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS)	a. Penyusunan SOP Manajemen dan Prosedur bagi KJKS/UJKS Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM	Juni 2008	Terwujudnya Pengelola KJKS/UJKS Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi dan prinsip syariah	Menteri Negara Koperasi dan UKM

b. Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 49 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi	Juni 2008	Terlaksananya pengawasan pengendalian internal KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Menteri Negara Koperasi dan UKM
		c. Pengawasan KSP/USP Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Pengawasan KSP/USP Koperasi	Juni 2008	Terlaksananya pengawasan pengendalian internal KSP/UKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Menteri Negara Koperasi dan UKM
		d. Penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi	Juni 2008	Terwujudnya pengelola KJKS/UJKS Koperasi yang sehat dan mantap, efektif, efisien, dan profesional	Menteri Negara Koperasi dan UKM

e. Penilaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 50 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		e. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Juni 2008	Terwujudnya pengelola KSP/USP Koperasi yang sehat dan mantap, efektif, efisien, dan profesional	Menteri Negara Koperasi dan UKM
		f. Peningkatan mutu SDM dan Manajemen melalui dan sertifikasi pengelolaan jasa keuangan	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Peningkatan Mutu SDM Pengelola Jasa Keuangan	Juli 2008	Terwujudnya SDM pengelola jasa keuangan yang profesional, dan meningkatnya kualitas manajemen koperasi jasa keuangan	Menteri Negara Koperasi dan UKM

B. Perluasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 51 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. Perluasan Akses Pasar Bagi UMKM	1. Peningkatan pelayanan ekspor produk UMKM melalui penyempurnaan prosedur Pemberitahuan Konsoolidasi Barang Ekspor (PKBE)	a. Menata dan mendesign kembali sistem dan tata laksana Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) Ekspor untuk barang konsolidasi.	i) Design dan tatalaksana SAP ekspor khusus untuk barang konsolidasi (SAP-PKBE) yang sesuai standar internasional dan memenuhi kebutuhan UMKM	Desember 2008	Tersedianya sistem yang efektif untuk pelayanan dokumen kepabeananan bagi eksportir barang konsolidasi termasuk UMKM karena pelaku UMKM mendapat kejelasan prosedur, biaya, dan waktu yang terkait pelayanan dokumen barang yang terkondolidasi	Menteri Keuangan

ii) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 52 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Sistem pelayanan PKBE <i>online</i> yang terintegrasi ke dalam sistem NSW	Desember 2008	Tersedianya sistem yang efektif untuk pelayanan dokumen kepabeanan bagi eksportir barang konsolidasi termasuk UMKM karena pelaku UMKM mendapat kejelasan prosedur, biaya, dan waktu yang terkait pelayanan dokumen barang yang terkondolidasi	Menteri Keuangan
		b. Merevisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Dokumen PKBE	Peraturan Menteri Keuangan tentang PKBE	Desember 2008	Tersedianya peraturan yang lebih jelas mengenai prosedur penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean berupa PKBE	Menteri Keuangan

c. Penyederhanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 53 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Penyederhanaan prosedur PKBE untuk produk UMKM	Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Ekspor Khusus untuk Produk UMKM	Desember 2008	Terwujudnya transparansi dan keakuratan data dalam penyelesaian dokumen kepabeanaan untuk ekspor barang konsolidasi termasuk UMKM	Menteri Keuangan
	2. Peningkatan peluang pasar bagi UMKM dalam pengembangan penanaman modal dan ekspor	Pendirian Kawasan UMKM di dalam Kawasan Ekonomi	<i>Pilot Project</i> Kawasan UMKM di Batam	Desember 2008	Terbukanya peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan Kawasan Ekonomi sebagai tempat pengembangan usaha berbasis outsourcing	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Perluasan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 54 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Perluasan pasar ekspor produk UMKM	a. Membuat <i>database on-line</i> mitra dagang dan penanaman modal UMKM	<i>Database</i> mitra dagang dan penanaman modal UMKM secara <i>on-line</i>	Agustus 2008 – berlanjut	Tersedianya informasi mengenai mitra dagang dan penanaman modal di luar negeri untuk memperluas pasar dan pengembangan UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
		b. Mendorong efektifitas Pengembangan <i>One Village One Product</i> (OVOP)	Kebijakan Pengembangan OVOP 2008 – 2009	Oktober 2008	Berkembangnya sinergi produksi dan pasar	Menteri Perindustrian
		c. Meningkatkan pasar ekspor UMKM melalui perdagangan lintas batas.	Peningkatan kelembagaan <i>marketing point</i> di wilayah perbatasan	Agustus 2008 – berlanjut	Meningkatkan akses pasar UMKM dalam perdagangan lintas batas.	Menteri Perdagangan

d. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 55 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		d. Meningkatkan keikutsertaan UMKM dalam Promosi <i>Tourism Trade and Investment</i> (TTI) di luar negeri	Diseminasi Daftar Rencana Pemeran/ Promosi TTI dan Persyaratan Keikutsertaan UMKM	Juni 2008 - berlanjut	Meningkatnya keikutsertaan UMKM dalam TTI	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	4. Peluang UMKM dalam Kegiatan <i>Meeting Incentive Convention and Exhibition</i> (MICE)	Meningkatkan Penggunaan Produk UMKM dalam Kegiatan MICE	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penggunaan Jasa dan Produk UMKM dalam Kegiatan MICE	Juni 2008	Sinerji antara produksi UMKM dan kegiatan kepariwisataan	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
C. Peningkatan Kapasitas SDM/ Kewirausahaan	1. Peningkatan penggunaan teknologi	Peningkatan Peran Pusat Inovasi - UMKM	Membangun <i>Portal Gateway</i> UMKM, Intermediasi Teknologi dan <i>Innovative Findings</i> , Klinik HKI	Oktober 2008 berlanjut	Meningkatnya produktivitas, diversifikasi produk, nilai tambah, dan daya saing UMKM	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kajian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 56 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			<i>Kajian Technology Foresight</i>	Desember 2008	Tersusunnya skenario kebijakan pengembangan teknologi untuk UMKM dan tersedianya <i>database current and future technology</i>	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	2. Meningkatkan kapasitas pengembangan industri kreatif	Paket-paket pelatihan kewirusahaan (produksi, keuangan, dan pemasaran)	Paket pelatihan pengembangan industri kreatif tertentu (TIK, industri kerajinan dan barang seni) dan pengembangan industri kecil dan menengah tertentu (batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, serta makanan/ minuman ringan)	Juli 2008 – berlanjut	Meningkatnya produksi industri kreatif	Menteri Perindustrian

3. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 57 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Peningkatan Kewirausahaan UMKM di Daerah Tertentu	Sinkronisasi program pengembangan perekonomian rakyat di daerah tertentu (tertinggal, transmigrasi, pariwisata, dan optimalisasi potensi perempuan di suatu daerah)	Pengembangan produksi UMKM dan pasar tradisional di daerah tertentu	Agustus 2008 dan berlanjut	Meningkatnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Daerah	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	4. Pengembangan model Kemitraan	Kajian pengembangan model kemitraan	Konsep model kemitraan	Desember 2008	Terwujudnya konsep model kemitraan	Menteri Negara BUMN
D.Reformasi Regulasi	1. Penyederhanaan perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah serta registrasi bagi Usaha Mikro	a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penyederhanaan perizinan Usaha Kecil dan Menengah dalam Permendagri tentang Pelayanan Satu Pintu	Laporan berkala tentang perkembangan Perda dan penyelesaian permasalahan perizinan Usaha Kecil Menengah	Juli 2008 - berlanjut	Adanya kemudahan perizinan untuk kegiatan Usaha Kecil dan Menengah.	Menteri Dalam Negeri

b. Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 58 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Penetapan mekanisme dan sistem registrasi bagi Usaha Mikro di daerah	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> , Administrasi Publik untuk usaha mikro	Agustus 2008	Kemudahan dalam registrasi Usaha Mikro	Menteri Dalam Negeri
	2. Pelaksanaan Undang-Undang tentang UMKM	Mempersiapkan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Undang-Undang tentang UMKM	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang UMKM	Setelah Undang-Undang tentang UMKM diundangkan	Efektivitas pemberdayaan UMKM	Menteri Negara Koperasi dan UKM

3. Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 59 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Pengembangan ekonomi kreatif	Mempersiapkan kerangka dasar dan kebijakan untuk Pengembangan ekonomi kreatif	i) Cetak Biru pengembangan ekonomi kreatif	Juni 2008	Mendorong pengembangan 14 industri kreatif secara sinergistis sebagai sumbangan ke pertumbuhan ekspor, lapangan kerja dan UKM	Menteri Perdagangan
			ii) Rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif (per departemen)	September 2008		

F. PELAKSANAAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 60 ~

F. PELAKSANAAN KOMITMEN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* – AEC)

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (<i>ASEAN Economic Community</i> - AEC)	1. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas	a. Penurunan dan Penghapusan Tarif Impor dari ASEAN	i) Peraturan Menteri Keuangan tentang penghapusan tarif Bea Masuk (BM) untuk produk- produk dalam <i>Priority Integration Sectors (PIS)</i> sesuai ketentuan ASEAN <i>Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors (2007)</i>	Desember 2008 - berlanjut	Pemenuhan komitmen AEC untuk penghapusan BM produk-produk dalam PIS dan mendorong peningkatan daya saing PIS dan hilirnya	Menteri Keuangan

ii) Kesiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 61 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Kesiapan pemindahan produk <i>Sensitive List</i> (SL) ke dalam skema <i>Common Effective Preferential Tariff</i> (CEPT) pada Desember 2010	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan
			iii) Kesiapan penurunan tarif produk SL yang menjadi CEPT menjadi 0% – 5% pada Desember 2010	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Keuangan
			iv) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan produk <i>General Exception (GE) List</i> sesuai dengan Perjanjian CEPT	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan

b. Penghilangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 62 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Penghilangan <i>Non-Tariff Barriers</i>	i) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peningkatan Transparansi Mengikuti <i>Protocol on Notification Procedure and Surveillance Mechanism (2007)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan
			ii) Peraturan Menteri Perdagangan tentang <i>Standstill and Rollback (2007)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	

iii) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 63 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii)Peraturan Menteri Perdagangan tentang Deregulasi <i>Non-Tariff Barriers (NTBs)</i> untuk impor dari Negara-negara Anggota ASEAN sesuai dengan <i>Work Programme on NTBs Eliminations (2007)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	Menteri Perdagangan
			iv)Peraturan Menteri Perdagangan tentang Transparansi <i>Non-Tariff Measures (NTMs)</i>	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC dan peningkatan daya saing nasional	

c. Rules...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 64 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		<i>c. Rules of Origin (ROO)</i>	i) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Reformasi dan Perluasan <i>Rules of Origin (ROO) CEPT</i>	Desember 2009	Harmonisasi Peraturan ROO Indonesia dengan perluasan ROO CEPT	Menteri Perdagangan
			ii) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyederhanaan Prosedur Sertifikasi Operasional untuk ROO CEPT (2007)	Desember 2009	Kelancaran dan kemudahan pengawasan arus barang	
		d. Fasilitasi Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Kerjasama Perdagangan Regional	Desember 2009	Tersedianya pedoman kerjasama perdagangan regional	Menteri Perdagangan

e. Customs...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 65 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		<i>e. Customs Integration</i>	Kesiapan Implementasi ASEAN <i>e-customs</i> pada Desember 2011	Desember 2009	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Keuangan
		<i>f. Standards and Technical Barriers to Trade</i>	Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan harmonisasi standar sesuai <i>ASEAN Policy Guidelines on Standard and Conformance</i>	Desember 2008	Tersedianya acuan untuk proses produksi, impor dan ekspor	Menteri Perdagangan
	2. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas	Melakukan koordinasi penerbitan peraturan untuk liberalisasi bidang jasa	Koordinasi penerbitan peraturan untuk liberalisasi bidang jasa	April 2008 – berlanjut	Memberikan kesatuan sikap dan konsistensi dalam perdagangan internasional di bidang jasa	Menteri Perdagangan

3. Komitmen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 66 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas	Menerbitkan Cetak Biru Strategi Pengembangan Penanaman Modal dalam Menghadapi <i>ASEAN Comprehensive Investment (ACIA) 2015</i>	Cetak Biru Strategi Pengembangan Penanaman modal Dalam Menghadapi <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) 2015</i>	Desember 2009	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan komitmen di bidang penanaman modal	Kepala BKPM
	4. Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas	Melakukan kajian Harmonisasi Standar Pasar Modal ASEAN di Bidang <i>Offering Rules for Debt Securities, Disclosure Requirements and Distribution Rules</i>	Kajian Harmonisasi Standar Pasar Modal ASEAN di Bidang <i>Offering Rules for Debt Securities, Disclosure Requirements and Distribution Rules</i>	Desember 2009	Meningkatkan daya saing Pasar Modal Nasional	Menteri Keuangan

5. Komitmen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 67 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5. Komitmen AEC untuk Arus Tenaga Kerja Terampil Secara Bebas	Menyusun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kompetensi dan Kualifikasi Keahlian untuk Pekerjaan dan Pelatihan yang Dibutuhkan Sektor	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kompetensi dan Kualifikasi Keahlian untuk Pekerjaan dan Pelatihan yang Dibutuhkan Sektor	Desember 2009	Meningkatkan kualifikasi Tenaga Kerja Indonesia	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan	Melakukan Harmonisasi Ketentuan Penggunaan Bahan Kimia untuk <i>Aquaculture</i> Sesuai Standar Internasional	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harmonisasi ketentuan Penggunaan Bahan Kimia untuk <i>Aquaculture</i> Sesuai Standar Internasional	Desember 2009	Meningkatkan mutu ekspor di bidang perikanan	Menteri Kelautan dan Perikanan

7. Komitmen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 68 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	7. Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif	Menerbitkan peraturan dalam rangka melaksanakan Komitmen Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif	i) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Implementasi <i>Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Perhubungan
			ii) Peraturan Menteri ESDM berkaitan dengan Ratifikasi <i>MoU on ASEAN Power Grid</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri ESDM
			iii) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Keuangan

iv) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 69 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iv) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Protocol to Implement the Fourth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Keuangan
			v) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Protocol to Implement the Fifth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	

vi) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 70 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			vi) Peraturan Presiden tentang Ratifikasi <i>Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors</i>	Desember 2008	Pemenuhan komitmen AEC	Menteri Perdagangan
	8. Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	Koordinasi Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	Laporan 6 bulanan	Juni 2008 - berlanjut	Mewujudkan integrasi regional dalam rangka meningkatkan daya saing global dan memudahkan bisnis dan konsumen memanfaatkan peluang pasar	Menteri Perdagangan

G. INFRASTRUKTUR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 71 ~

G. INFRASTRUKTUR

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. TARGET-TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR						
A. Dukungan Infrastruktur terhadap Perekonomian (<i>Economic Infrastructure</i>)	1. Pembangunan Jaringan Jalan Nasional dan Jembatan	a. Meningkatkan kapasitas jalan dan jaringan jalan nasional/ jalan tol pada jalur ekonomi utama	i) Tersedianya 4 lajur jalan antara Jakarta – Semarang	Februari 2009	Meningkatnya efisiensi transportasi/ angkutan barang & penumpang di jalur Pantura	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) terselesaikannya pembangunan 204 km jalan di pantai timur Pulau Sumatera: Bakaheuni– Sukadana – Menggala	Agustus 2009	Mantapnya jalur lintas Timur Sumatera sehingga dapat menurunkan biaya transportasi darat di jalur ekonomi utama Pulau Sumatera	

iii) Berfungsinya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 72 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Berfungsinya jalur Lintas Selatan Pulau Kalimantan: <ul style="list-style-type: none">• Pontianak-Tayan.• Tayan-Palangkaraya-Balikpapan-Samarinda• Dimulainya pembangunan Jembatan Tayan	Desember 2009	Menurunnya biaya transportasi darat di jalur ekonomi utama Pulau Kalimantan	Menteri Pekerjaan Umum
			iv) Berfungsinya jalur Lintas Barat Pulau Sulawesi : Makassar-Manado	Desember 2009	Menurunnya biaya transportasi darat di jalur ekonomi utama Pulau Sulawesi	

v) Terbangunnya ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 73 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			v) Terbangunnya 641 km Jalan Tol di Pulau Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan	Desember 2009	Meningkatnya efisiensi transportasi/angkutan barang & penumpang	
		b. Mempercepat pembangunan jembatan Suramadu	Terselesaikannya pembangunan Jembatan Suramadu	Maret 2009	Bertumbuhnya ekonomi di Wilayah Jawa-Madura	Menteri Pekerjaan Umum
		c. Melaksanakan <i>pilot project</i> pemeliharaan jalan dengan prinsip <i>"performance based contract"</i>	i) Pelaksanaan <i>extended warranty</i> period di 10 ruas jalan nasional	Desember 2008	Meningkatnya kualitas pelayanan jalan nasional	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan	Desember 2009		

2. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 74 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	a. Merevitalisasi perkeretaapian nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	i) Pemisahan operasi sarana dan prasarana perkeretaapian	Desember 2008	Meningkatnya kualitas pelayanan kereta api nasional	Menteri Perhubungan
			ii) Pemisahan operasi manajemen kereta api Jabodetabek	Desember 2008		Menteri Negara BUMN
			iii) Pemisahan operasi manajemen kereta api Sumatera Selatan	Desember 2008		
		b. Pembangunan dan operasionalisasi Jalur Kereta Api Bandara	i) Diselesaikannya pembangunan kereta api ke Bandara Soekarno-Hatta	Desember 2009	Meningkatkan aksesibilitas menuju Bandara	Menteri Perhubungan

ii) Diselesaikannya ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 75 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Diselesaikannya pembangunan kereta api ke Bandara Kualanamu – Medan sepanjang 26 km	Oktober 2009		Menteri Perhubungan
			iii) Beroperasinya Kereta Api Yogyakarta – Bandara Adi Sucipto	Agustus 2008		
		c. Menyusun Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007: i) Peraturan Pemerintah tentang Prasarana Perkeretaapian; ii) Peraturan Pemerintah tentang Sarana Perkeretaapian;	Juni 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya mutu pelayanan, keamanan, dan keselamatan • Meningkatnya peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan swasta 	Menteri Perhubungan

iii) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 76 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api; iv) Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian.			Menteri Perhubungan
	3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bandara	Memperbaiki aksesibilitas transportasi udara di Indonesia	i) Penuntasan pembangunan pengembangan Bandara Hasanudin – Makassar	Desember 2009	Meningkatnya pelayanan bandara regional	Menteri Perhubungan
			ii) Beroperasinya bandara Kualanamu sebagai pengganti bandara Polonia, Medan	Oktober 2009	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan penerbangan	

4. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 77 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pengembangan pelabuhan di Indonesia	i) Terelesaikannya pengembangan fasilitas pelabuhan Tanjung Priok dengan peningkatan kapasitas alur/ kolam pelabuhan	Desember 2009	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kapasitas pelayanan transportasi laut• Meningkatnya kelancaran arus barang ekspor dan impor	Menteri Perhubungan
			ii) Terelesaikannya pembangunan pelabuhan Bojonegara untuk dapat dioperasikan secara terbatas	September 2009		

B. Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. Peningkatan Daya Saing Global	1. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mengembangkan TIK melalui percepatan program-program flagship DeTIKNas <i>a. E-Pendidikan</i> Mengembangkan konten dengan melibatkan pengajar serta jaringan intranet	i) Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) yang menghubungkan 24.015 kantor Diknas tingkat provinsi dan kabupaten, sekolah dan Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia	November 2008	Meningkatnya kemampuan iptek & keahlian SDM yang siap pakai	Menteri Pendidikan Nasional
			ii) Pengembangan Jardiknas hingga mencapai total 39.715 kantor Diknas tingkat provinsi dan kabupaten, sekolah dan PT di seluruh Indonesia	Desember 2009		

b. *e-Procurement* ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 79 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. <i>e-Procurement</i> Menyempurnakan model <i>e-tendering</i> dan pengembangan model <i>e-procurement</i> lainnya	i) Beroperasinya <i>E-Procurement</i> di Bappenas (2007) dan Departemen Keuangan (2008), serta secara berkelanjutan diterapkan di kantor – kantor Pemerintah.	Desember 2008 dan berlanjut	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang dan jasa di Kantor-kantor Pemerintah	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
			ii) Penerapan <i>e-procurement</i> pada 5 provinsi: Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo (2008).	Desember 2008		

c. Palapa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 80 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. <i>Palapa Ring</i> Membangun jaringan <i>back-bone</i> serat optik	Jaringan <i>back-bone</i> serat optik di Indonesia bagian timur yang menjangkau 11 Provinsi yang meliputi 30 Kabupaten/Kota	Phase 1 : siap beroperasi Triwulan- I 2009 Phase VI (tahap akhir) : siap beroperasi Triwulan-III 2010	Terhubungnya seluruh kota/kabupaten di Kawasan Timur Indonesia dengan serat optik	Menteri Komunikasi dan Informatika
		d. Menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Informatika dan Transasaksi Elektronik	i) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Transaksi Elektronik	September 2009	Terciptanya kepastian hukum di bidang informasi dan Transaksi Elektronik	Menteri Komunikasi dan Informatika

ii) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 81 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik	September 2009	Terciptanya kepastian hukum di bidang informasi dan Transaksi Elektronik	Menteri Komunikasi dan Informatika
			iii) Peraturan Pemerintah tentang Pengelola Nama Domain			
			iv) Peraturan Pemerintah tentang <i>Lawful Interception</i>			
			v) Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Data Strategi			
	2. Internet gratis untuk SMU sederajat diseluruh Indonesia	Membangun prasarana internet	Pelayanan internet gratis pada 7000 SMU dan sederajat dan brlanjut hingga mencapai 17000 SMU dan sederajat	Desember 2008 dan berlanjut	Mempercepat penyediaan akses internet gratis di seluruh SMU dan sederajat	Menteri Pendidikan Nasional

3. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 82 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Pembangunan Telekomunikasi Pedesaan	Mempercepat pelaksanaan kebijakan Desa Berdering dan Desa Pintar melalui pembangunan Telepon baik inisiatif Pemda maupun APBN (USO);	i) Tersedianya akses telepon di 32 Provinsi yang mencakup 38.471 desa (Desa Berdering).	September 2009	Terwujudnya aksesibilitas telekomunikasi bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan dan jasa telekomunikasi	Menteri Komunikasi dan Informatika
			ii) Penyediaan jasa internet pada 10 kecamatan terpilih sebagai pilot project (percontohan) dan secara berkelanjutan akan mencakup 43.825 desa pada tahun 2013 (Desa Pintar).	September 2009 ~ berlanjut		

C. Pemenuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 83 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
C. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (<i>Basic Needs</i>)	1. Pengendalian Banjir	Mempercepat penyelesaian pembangunan drainase kota untuk pengendalian banjir, perbaikan tanggul dan normalisasi sungai di wilayah rawan banjir	i) terselesaikannya saluran Banjir Kanal Timur & Banjir Kanal Barat, dan normalisasi sungai-sungai di Jakarta.	Desember 2009	Menurunnya dampak banjir terhadap kegiatan perekonomian di wilayah tersebut	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Perbaikan tanggul dan normalisasi Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas dan Sungai Pemali Juana	Desember 2008 dan berlanjut		
			iii) Saluran penyalur banjir Sungai Deli ke Sungai Percut	Desember 2008		

2. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

~ 84 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Penyediaan sarana dan prasarana Air Minum	Mengembangkan kapasitas air minum di kawasan rawan air di perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	i) Peningkatan kapasitas produksi 5.700 l/dt untuk mendukung peningkatan cakupan air minum bagi 2,2 juta jiwa.	Desember 2008	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui persediaan prasarana dan sarana air minum	Menteri Pekerjaan Umum
ii) Peningkatan kapasitas produksi 6.600 l/dt untuk mendukung peningkatan cakupan air minum bagi 2,97 juta jiwa.			Desember 2009			
iii) Peningkatan jumlah PDAM dengan kategori sehat sebanyak 24 PDAM			Desember 2008	Meningkatnya kinerja pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM	Menteri Pekerjaan Umum	

iv) Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 85 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iv) Peningkatan jumlah PDAM dengan kategori sehat sebanyak 36 PDAM	Desember 2009		Menteri Pekerjaan Umum
	3. Pengelolaan Air Limbah	a. Membangun Prasarana dan Sarana Air Limbah Terpusat dan Peningkatan Pelayanan Air Limbah Bagi Masyarakat	i) Tersedianya pengelolaan air limbah terpusat di Denpasar dengan kapasitas pelayan 250.000 jiwa dan dikota-kota Medan, Cirebon, dan Surakarta dengan total kapasitas pelayanan bagi 27.370 jiwa	Oktober 2008	Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah serta mendorong Pemda menurunkan pembuangan air limbah secara terbuka	Menteri Pekerjaan Umum

ii) Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 86 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Peningkatan cakupan pelayanan air limbah terpusat di Bandung dan Yogyakarta bagi 93.086 jiwa.	Desember 2009		Menteri Pekerjaan Umum
		b. Menstimulasi Prasarana dan Sarana Sanitasi Komunal	Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 130 kawasan dengan cakupan pelayanan 66.000 jiwa	Desember 2008		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 87 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	4. Pengelolaan Persampahan	Membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional	i) Tersedianya TPA sampah Bangli untuk pelayanan secara regional di kawasan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Bangli, dan Kab. Klungkung), dengan cakupan pelayanan 513.114 Jiwa	Desember 2008	Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan persampahan	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Tersedianya TPA sampah Gorontalo untuk pelayanan secara regional di Kota Gorontalo dan Kab. Gorontalo dengan cakupan pelayanan 295.714 Jiwa	Desember 2009		

5. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 88 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	5. Penyediaan Angkutan Umum di daerah terisolasi, belum berkembang dan perbatasan	Menunjang angkutan keperintisan pada sektor perhubungan laut, perhubungan darat dan perhubungan udara	i) Terselenggaranya pelayanan angkutan udara perintis di 93 rute	Desember 2008	Mengurangi keterisolasian daerah	Menteri Perhubungan
ii) Terselenggaranya Angkutan Darat perintis pada 128 trayek						
iii) Terselenggaranya penyeberangan perintis pada 73 rute						
iv) Terselenggaranya pelayanan angkutan udara perintis di 93 rute			Desember 2009			
v) Terselenggaranya Angkutan Darat perintis pada 160 trayek						

vi) Terselenggaranya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 89 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			vi) Terselenggaranya penyeberangan perintis pada 75 rute	Desember 2009	Mengurangi keterisolasian daerah	Menteri Perhubungan
	6. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)	Peningkatan Infrastruktur Pedesaan di desa tertinggal/ desa miskin	i) Terbangunnya infrastruktur pedesaan di 1.800 desa tertinggal	Desember 2008	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar di desa tertinggal/ desa miskin	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Terbangunnya infrastruktur pedesaan di 3.250 desa tertinggal	Desember 2009		
	7. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)	Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan	Peningkatan sosial ekonomi masyarakat di 1.044 desa tertinggal dan perbatasan	Desember 2009	Meningkatkan perekonomian lokal di daerah tertinggal dan perbatasan	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

8. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 90 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	8. Pembangunan Perumahan	a. Pembangunan program 1.000 <i>tower</i> rumah susun sederhana	i) 78 <i>tower</i> rusuna yang merupakan lanjutan program 2007, ii) 68 <i>tower</i> rusuna yang merupakan program tahun 2008 dan iii) 219 <i>tower</i> rusuna yang merupakan program tahun 2008/2009;	November 2008 Desember 2009 Desember 2010	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya rusuna bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) khususnya MBR• Berkembangnya sektor konstruksi dan pendukung melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan• Tertatanya lingkungan perkotaan dengan konsep pembangunan pemukiman yang berkelanjutan	Menteri Negara Perumahan Rakyat

b. Evaluasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 91 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Evaluasi proses perijinan pembangunan perumahan	i) Hasil kajian	November 2008	Terjadinya percepatan dalam pembangunan perumahan rakyat/rumah susun	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			ii) Peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pemberian Kemudahan Perijinan dan insentif dalam rangka Percepatan Pembangunan Rusuna/Apartemen Rakyat di Kawasan Perkotaan	Oktober 2008 dan berlanjut		Menteri Dalam Negeri

II. PEMBANGUNAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 92 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
II. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN POLA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)						
Mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur	Mempercepat pembangunan infrastruktur dengan pola KPS	a. Menyusun tata cara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur	i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang tata cara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur (sektor air)	Desember 2008	Prosedur dan tata cara yang jelas untuk mengetahui durasi Proyek KPS	Menteri Pekerjaan Umum
			ii) Peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara pelaksanaan KPS dalam penyediaan infrastruktur (sektor kereta api)	Desember 2008	Prosedur dan tata cara yang jelas untuk mengetahui durasi Proyek KPS	Menteri Perhubungan

b. Mempercepat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 93 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Mempercepat pembangunan Model Proyek KPS di Indonesia	i) Dimulainya pembangunan PLTU Jawa Tengah, Pematang.	Desember 2009	Mendukung pasokan listrik di Jawa	Menteri ESDM, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS .
			ii) Beroperasinya Tangerang <i>Water Supply</i>	Desember 2009	Perluasan layanan air minum di Tangerang	Menteri Pekerjaan Umum
		c. Meningkatkan kualitas proyek-proyek KPS di pusat maupun daerah dengan memanfaatkan fasilitas <i>Project Development Facility (PDF)</i>	Tersedianya <i>Feasibility Study</i> dan dokumen tender KPS	Desember 2008 dan berlanjut	Meningkatnya jumlah proyek KPS yang diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

d. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 94 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		d. Menyusun daftar proyek KPS - <i>PPP book</i> (KPS Book)	Tersedianya <i>PPP book</i> yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur	Desember 2008	Meningkatnya proyek kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
III. DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR						
A. Mempercepat penyediaan tanah dan pembiayaan	1. Percepatan Pengadaan dan Pencadangan Tanah	Menyusun Prosedur Tetap (Protap) proses Pengadaan dan Pencadangan Tanah untuk pembangunan infrastruktur	Protap Pengadaan dan Pencadangan Tanah untuk pembangunan infrastruktur	Oktober 2009	Kejelasan dalam proses Pengadaan dan Pencadangan Tanah	Kepala Badan Pertanahan Nasional
	2. Pembentukan Kelembagaan Keuangan non Bank untuk Infrastruktur	Menyusun Peraturan dan mempersiapkan fasilitas pendukung kelembagaan keuangan non Bank untuk Infrastruktur	i) Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Institusi <i>Guarantee Fund</i>	Desember 2008	Meningkatnya proyek kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur	Menteri Keuangan

ii) Beroperasinya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 95 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			ii) Beroperasinya <i>Infrastructure Fund</i> untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia	Desember 2008	Meningkatnya proyek kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur	Menteri Keuangan
B. Memperjelas kebijakan pemerintah dalam PSO	Merumuskan kebijakan PSO	Menyusun peraturan tentang kebijakan pelayanan umum (PSO) di bidang infrastruktur	Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan PSO	Desember 2008	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi PSO dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

H. BIDANG ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 96 ~

H. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Melanjutkan Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif	Revitalisasi Hubungan Industrial	a. Mendorong pembentukan dan Peningkatan Peran LKS Bipartit sebagai Forum Musyawarah dan Konsultasi antara Pekerja dan Pengusaha	i) Revisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit	November 2008	Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di perusahaan-perusahaan.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			ii) Penyusunan Pedoman Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan			

b. Mendorong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 97 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Mendorong Penyelesaian Perselisihan (Perselisihan Kepentingan, Perselisihan antar SP/SB, Perselisihan Hak, dan Perselisihan PHK) melalui perundingan Bipartit	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Melalui Perundingan Bipartit	November 2008	Mempercepat penyelesaian perselisihan antar pekerja dan pengusaha serta antar SP/SB.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		c. Mengoptimalkan Peran LKS Tripartit sebagai forum musyawarah dan konsultasi antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja	Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota	November 2008	Terwujudnya kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dapat mendukung iklim hubungan industrial yang harmonis	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

B. Memperkuat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 98 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. Memperkuat kelembagaan pelatihan dan produktivitas	Melanjutkan Revitalisasi Lembaga Pelatihan Kerja/BLK.	Meningkatkan kerja-sama Lembaga Pelatihan Kerja/BLK dengan lembaga pelatihan Perusahaan/swasta.	i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja dengan Swasta	Agustus 2008	10 LPK berbasis kompetensi dan terakreditasi sesuai dengan kejuruan unggulan untuk bidang/kejuruan: (1) Otomotif (BLKI Semarang/BBPLKDN Bandung/BBPLKLN CEVEST/BBLKI Surakarta/BLKI Makassar) (2) Pengelasan (BLK Condet/BBLKI Serang/BBLKI Medan/BBPLKLN-CEVEST/BLKI Makassar)	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan
			ii) 4 buah Kontrak Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta	Desember 2008		
			iii) 6 buah Kontrak Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta.	Desember 2009		

3) Logam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 99 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					(3) Logam/mesin (BBLKI Serang/ BBPLKLN CEVEST/BBLKI Medan/ BBPLKDN Bandung/ BLKI Samarinda) (4) Listrik (BBPLKLN CEVEST/BBLKI Serang/ BBPLKDN Bandung/BLKI Makassar/ BBLKI Medan/BBLKI Surakarta/BLKI Semarang/BLKI Ternate/BLKI Sorong).IT (BBPLKLN CEVEST/ BBPLKDN Bandung)	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan

(5) Elektronika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 100 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					(5) Elektronika (BBPLKDN Bandung/ BBPLKLN CEVEST/BBLKI Medan/BLKI Makassar/ BBLKI Surakarta) (6) Konstruksi (Balai Pelatihan Jasa Konstruksi/ Peralatan Jakarta) (7) Perikanan/ budidaya (BPPP Ambon/Tegal/ Medan) (8) Hortikultura (BPPP Lembang)	Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan

(9) Peternakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 101 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					(9) Peternakan (BB Diklat Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan (BBDAPKH) Cinagara, Bogor) (10) Agribisnis/ Perkebunan (BDAPTPS) Binuang, Kalsel/ Kepindang, Malang)	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan

C. Pengembangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 102 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
C. Pengembangan Wilayah/ Transmigrasi Tertinggal	Revitalisasi wilayah tertinggal yang diintegrasikan dengan wilayah sekitar dalam lingkup struktur ruang/wilayah/kawasan	Pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi wilayah/kawasan yang mempunyai skala ekonomis regional.	i) Peraturan Daerah tentang Badan Pengelola Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru/ Kawasan Terpadu Mandiri (KTM).	Desember 2009	a. Tahun 2008 terbentuk 4 KTM di 4 kabupaten Berbasis Komoditas Unggulan Wilayah (Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyu Asin, dan Kab. Tulang Bawang).	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Bupati
			ii) Komoditas Unggulan yang dihasilkan berbasis sawit, karet, agung, tebu dan jagung.	Desember 2009	b. Tahun 2009 terbentuk 14 KTM di 14 Kabupaten.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur, dan Bupati

iii) Terciptanya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 103 ~

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			iii) Terciptanya lapangan kerja baru		c. Tahun 2009 terbentuk 14 KTM di 14 Kabupaten.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Gubernur, dan Bupati
			iv) Terbentuknya forum ekonomi masyarakat lokal.			
D. Perkuatan Sistem Data Base Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Integrasi Data Base TKI	Pembentukan <i>on-line system</i> dengan mengintegrasikan sistem informasi lintas instansi (sistem informasi kependudukan, <i>Job Order</i> , Paspur, Bursa Kerja) tentang TKI.	Terbentuknya data Based TKI secara <i>on-line system</i>	Desember 2008	Diperoleh data yang valid tentang jumlah TKI sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	Menteri Komunikasi dan Informatika

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,



Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO